



► *Perdagangan Orang dalam Sektor Perikanan: Kasus Benjina*



► *Focus-Group Discussion tentang Keamanan Maritim di Indonesia, 23-24 April 2015, Jakarta*



► *IOM dan Badan Keamanan Laut*

HAL 1

HAL 2 & 3

PAGE 4

# KEAMANAN MARITIM

EDISI 7

JUNI

2015

## Perdagangan Orang Dalam Sektor Perikanan: Kasus Benjina

*Sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim kami, tetapi juga sebagai bentuk tanggungjawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.*

**Joko Widodo, Presiden RI, KTT Asia Timur ke-9, Naypyidaw, Myanmar, 13 November 2014**



*Rapat Koordinasi IOM-Pemerintah Indonesia di Tual, 8 April 2015*

Kesigapan pemerintah dalam menanggapi kasus Benjina menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam memberantas tindak pidana perdagangan manusia, utamanya yang terjadi dalam industri perikanan.

Penderitaan para nelayan asing yang terdampar di kota Benjina, Maluku, pertama kali diangkat melalui sebuah artikel yang diterbitkan oleh Associated Press di bulan Maret 2015 yang menyoediki kaitan antara perdagangan orang dengan industri perikanan global. Artikel ini, dimana AP menyebut para nelayan ini sebagai "budak", segera menarik perhatian media lokal, dan tak lama kemudian, perhatian pemerintah Indonesia serta masyarakat global.

Para nelayan, yang berasal dari Myanmar, Kamboja, Laos dan Thailand, mengaku mengalami kondisi kerja yang brutal, termasuk: pengurangan, kerja paksa, kerja tanpa bayaran, jam kerja yang berlebih, serta pelecehan psikologis dan fisik yang mengarah pada penyiksaan. Banyak di antara mereka yang dibuang dan tidak dapat kembali ke negara asal. Sejumlah nelayan sudah tinggal di Benjina selama

lebih dari 10 tahun dan kebanyakan berpikir tidak akan pernah bisa pulang.

Pemerintah tanpa membuang waktu segera mengirimkan tim kerja untuk melakukan penyelidikan dan penyelamatan. Pada awal April 2015, pemerintah berhasil mengevakuasi lebih dari 300 nelayan yang terdampar dari Benjina. Kasus mereka saat ini sedang diproses dan mereka akan segera dipulangkan ke negara masing-masing.

"Salah satu yang mendasari saya memprioritaskan pemberantasan, penangkapan ikan ilegal adalah, bukan hanya karena kita dirugikan triliunan rupiah, tapi juga karena illegal fishing ibaratnya merupakan kendaraan bagi berbagai kejahatan lain: penyelundupan manusia, penyelundupan narkoba, dan perbudakan," ucap Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Menanggapi permintaan dari pemerintah Indonesia, IOM memberikan bantuan dan pendampingan, dengan mengirimkan tim yang dipimpin oleh Wakil Kepala Misi IOM Indonesia, Steve Hamilton, terutama untuk membantu pengidentifikasian korban, penyaluran bantuan kemanusiaan, memfasilitasi layanan konsuler, dan pemulangan para nelayan ke negara asal.

"Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, kaki (para nelayan) dapat menginjak daratan lagi dan mereka bisa pulang, setelah kami dan pihak yang berwenang menemukan dan memproses mereka," ujar Hamilton.



IOM International Organization for Migration  
OIM Organisation internationale pour les migrations  
OIM Organización Internacional para las Migraciones

# Focus-Group Discussion tentang Permasalahan Keamanan Maritim di Indonesia, 23-24 April, 2015, Jakarta



Sjarief Widjaja, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Menyampaikan sambutan pada pembukaan FGD

Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia menyelenggarakan *focus group discussion* mengenai Keamanan Maritim yang berlangsung selama dua hari, dengan dukungan IOM, pada 23 dan 24 April 2015, di Jakarta. FGD tersebut diselenggarakan oleh Universitas Indonesia, Universitas Pertahanan Indonesia dan Coventry University, sebuah lembaga pendidikan di Inggris. Acara ini juga menghadirkan *keynote speech* oleh Dr. Desi Albert Mamahit, M.Sc., Kepala Bakamla (Badan Keamanan Laut) dan dihadiri oleh lebih dari 100 peserta dari berbagai sektor termasuk *Indonesian Shipowners Association* (Asosiasi Pemilik Kapal Nasional), Ditjen Imigrasi, Polisi Air, dan banyak lainnya. Acara tersebut dirangkul dengan *table-top exercise* yang difasilitasi oleh sejumlah ahli terkemuka: Drs. Melda Kamil Ariadno dan Professor Adrianus Meliala dari Universitas Indonesia, dan Dr. Abdul Rivai Ras dari Universitas Pertahanan Nasional. *Table-top exercise* tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi kunci yang akan dibagi dengan lembaga pemerintah kunci lainnya.

Di sambutan pembukaannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja, mengatakan bahwa kejahatan transnasional terorganisir, termasuk penyelundupan manusia dan perdagangan orang, merupakan kunci terhadap keamanan maritim Indonesia dan bagian tak terpisahkan dari rencana pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Presiden Indonesia yang baru telah berulang kali menyatakan ambisinya untuk mengubah Indonesia menjadi negara maritim sejati. "Sebagai negara yang terdiri dari 17,000 [sic] pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudra," ujar Presiden Joko Widodo tak lama setelah terpilih tahun lalu. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dan lautannya mempersembahkan kesempatan perekonomian yang besar. Bapak Widjaja memprediksi bahwa, bila dikelola dengan baik,

potensi perekonomian laut Indonesia akan dapat menghasilkan pendapatan lebih dari US\$ 660 milyar per tahun, termasuk dari sektor-sektor seperti perikanan, biofarmasi, pariwisata, pertambangan lepas pantai, dan transportasi laut.

Namun, bila tidak mengatasi permasalahan kejahatan transnasional terorganisir, visi ini tidak akan dapat menjadi kenyataan. Sebagai contoh, kerugian dari perikanan liar diprediksikan sekitar US\$ 20 milyar per tahun. Perikanan liar juga berhubungan dengan kejahatan lainnya, seperti perdagangan orang. Perompakan dan perampokan laut juga merupakan keprihatinan, dengan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan-kejahatan ini diprediksikan milyaran dolar setiap tahunnya.

## Keamanan Maritim dan IOM

IOM secara konsisten memainkan peranan yang semakin penting dalam membantu Negara-Negara untuk mengatasi tantangan manajemen migrasi global yang kompleks. IOM Indonesia bekerja sama dengan pemerintah terutama di bidang pengkajian manajemen migrasi dan perbatasan, melawan kejahatan transnasional terorganisir, dan manajemen perawatan migran. Upaya IOM Indonesia untuk melawan kejahatan transnasional terorganisir dilakukan pertama kali pada tahun 2000, dan telah berkembang secara signifikan. Dengan dukungan dana dari berbagai donor seperti Australia dan Kanada, sejumlah proyek telah dilaksanakan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya berkelanjutannya di bidang manajemen migrasi, dengan seluruh aktifitas dirancang untuk mendukung secara langsung kebijakan dan prioritas Pemerintah.

"Kami telah melalui proses untuk mempertimbangkan kembali segala hal yang kami lakukan sehubungan dengan penyelundupan manusia dan perdagangan orang, dalam konteks perikanan liar, contohnya, melakukan orientasi ulang sebagai suatu organisasi agar kami berada dalam posisi yang lebih baik untuk membantu upaya pemerintah dalam konteks keamanan maritim yang lebih luas," ujar Kepala Misi IOM di Indonesia, Mark Getchell.

## 14-Point Rekomendasi

Aspek Hukum dari Keamanan Maritim Indonesia <i>Fasilitator: Melda Kamil Ariadno, PhD (UI)</i>	Aspek Non-Hukum dari Keamanan Maritim Indonesia <i>Fasilitator: Col (Navy) Dr. Abdul Rivai Ras (UNHAN)</i>	Langkah-langkah Pencegahan & Penegakan yang Efektif <i>Fasilitator: Prof. Dr. Adrianus Meliala (UI)</i>
1. Pendidikan hukum dan paralegal untuk para nelayan dan awak kapal Indonesia.	5. Pertimbangan selayaknya diberikan kepada para nelayan lokal -- dalam hal adanya intervensi permasalahan maritim (perikanan).	10. Pembangunan kapasitas yang terus-menerus bagi seluruh pegawai lembaga penegak hukum: (a) kejahatan transnasional terorganisir; (b) proses penyelidikan dan penyidikan.
2. Pemberlakuan undang-undang atau penegakan hukum yang mendorong sanksi yang proporsional dan memadai, vis-à-vis, kejahatan dan pelanggaran perikanan.	6. Mendorong keikutsertaan masyarakat melalui acara peningkatan kesadaran di tingkat masyarakat, berkaitan dengan perikanan dan permasalahan keamanan maritim/manusia secara keseluruhan .	11. Meningkatkan sistem informasi & teknologi di antara pemangku kepentingan dan aktor-aktor utama, menuju pembagian informasi yang terpadu.
3. Proses perijinan dan lisensi perikanan sebaiknya mempertimbangkan keterpaduan dengan hukum domestic dan internasional.	7. Pemberian insentif untuk pegawai pemerintah yang ditempatkan di wilayah pesisir yang terpecil.	12. Satu lembaga tunggal sebaiknya ditunjuk yang memiliki tanggung jawab penuh secara keseluruhan dalam mengelola permasalahan keamanan maritim.
4. Peningkatan koordinasi dan pemahaman serta persepsi bersama (antara badan-badan yang relevan: KKP, Kemlu, Bakamla, diantara lain) tentang kesinkronan hukum perikanan serta pelaksanaannya, berkaitan dengan penangkapan kapal dan awak asing.	8. Kebijakan dan proses yang lebih efektif sehubungan dengan: (a) penerbitan ijin perikanan; (b) pajak perusahaan; dan (c) penanganan migran ireguler .	13. Pengadaan aktifitas penjangkauan dan pendidikan terhadap masyarakat setempat mengenai permasalahan keamanan maritim dan manusia .
	9. Meningkatkan kapasitas untuk memantau dan mengawasi wilayah dan pelabuhan yang rentan terhadap aktifitas kejahatan transnasional terorganisir, dengan meningkatkan sumber daya patroli perairan dan udara, serta, pengawasan pelabuhan.	14. Peningkatan koordinasi intra-regional dan internasional dalam hal urusan keamanan maritim dan permasalahan lainnya yang relevan dengan para peserta FGD.



# IOM dan Badan Keamanan Laut

IOM melakukan kunjungan pertama ke kantor Badan Keamanan Laut (Bakamla), pada tanggal 15 April 2015. Dalam kunjungan tersebut, Deputi Kepala Misi IOM di Indonesia, Steve Hamilton, mengungkapkan niat IOM untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan Bakamla, terutama dalam hal peningkatan kapasitas pegawai Bakamla, dengan mengingat posisi strategis instansi ini dalam rangka pemberantasan kejahatan transnasional terorganisir di atas laut seperti penyelundupan manusia dan perdagangan orang. Hamilton diterima dengan hangat oleh Dr. Desi Albert Mamahit, M.Sc, yang menyambut gagasan untuk mengembangkan kemitraan antar kedua lembaga ini, sambil juga merujuk pada keterkaitan antara fungsi dan tugas Bakamla dengan mandat IOM.



Sejak terpilih pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo telah mengutarakan visinya untuk mengubah Indonesia menjadi negara yang makmur dan sebagai sebuah kekuatan regional dengan identitas maritim yang kental, dengan cara memanfaatkan posisi geo-strategis Indonesia, keunikan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dan kekayaan laut yang luas dan beragam.

Pengamat regional pada umumnya menyambut visi Widodo tersebut – yang disebut sebagai Poros Maritim Dunia – dan mencatat bahwa Indonesia yang kuat dapat bermanfaat bagi seluruh kawasan. Namun di sisi lain, kebangkitan Indonesia dapat mengganggu struktur keamanan regional jika tidak direncanakan dengan baik.

“Kami mengapresiasi semua upaya IOM dalam menjamin migrasi yang manusiawi dan tertib yang dapat menguntungkan migran dan masyarakat. Bakamla berkomitmen pada prinsip yang sama, dan oleh sebab itu saya melihat potensi hubungan kerjasama antara Bakamla dan IOM,” ujar Mamahit.

## Peranan Bakamla dalam Keamanan Maritim Indonesia

Bakamla sebagai instansi yang baru didirikan, diharapkan akan memainkan peranan yang penting dalam kebangkitan damai Indonesia sebagai kekuatan maritim besar di Asia, menurut Kepala Bakamla, Dr. Desi Albert Mamahit, M.Sc.

Pendirian Bakamla diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Desember 2014. Instansi ini diberikan mandat untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla memiliki tujuh fungsi, termasuk di antaranya: Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan; melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum; dan memberikan bantuan pencarian dan pertolongan.

“Kami tidak ingin menciptakan dilema keamanan, dimana semakin Indonesia meningkatkan kekuatan maritimnya, semakin negara-negara tetangga merasa terancam, dan memicu mereka untuk membangun kekuatan mereka, yang kemudian akan membuat kami merasa terancam. Sekali dimulai, siklus ini akan berlanjut,” ucap Mamahit pada hari Kamis, 23 April 2015, saat memberikan Pidato Kunci pada acara Focus Group Discussion tentang Keamanan Maritim yang didukung oleh IOM. “Kami ingin kebangkitan kami memberikan kontribusi positif pada keamanan kawasan secara keseluruhan, bahkan dunia.”

“Bakamla adalah institusi sipil yang ditugaskan untuk menjaga keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia,” lanjut Mamahit. Status sipil Bakamla penting sebagai upaya pembangunan kepercayaan (*confidence-building measure*) dalam rangka meyakinkan para negara tetangga bahwa Indonesia lebih fokus pada upaya menjaga keamanan dan keselamatan di dalam wilayahnya sendiri, daripada memproyeksikan kekuatannya keluar.

“Kita perlu ingat bahwa Indonesia bangkit bersama dengan negara Asia lainnya, dan bahwa Indonesia ingin berkontribusi pada keamanan dan kemakmuran bersama Asia melalui status kita sebagai poros maritim dunia,” tutup Mamahit.



For further information, please contact:

### IOM in Indonesia

Steve Hamilton, Deputy Chief of Mission

Sampoerna Strategic Square, North Tower Floor 12A

Jl Jend Sudirman Kav 45-46, Jakarta 12930, Indonesia

Tel +62.21.5795.1275 Fax +62.215795.1274

The batik fabric design used in the IOM Indonesia newsletter banner is courtesy of Batik Kebon Indah – an IOM livelihood beneficiary under the Java Reconstruction Fund Programme in 2008-2011. Kebon was among 4,300 micro and small enterprises (MSE) in the earthquake-affected provinces of Yogyakarta and Central Java, assisted by IOM Indonesia. The Indonesian Batik is designated by UNESCO as a Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. Beyond supporting the revitalization of local economic development in areas of high migration pressure at post-disaster, IOM Indonesia has also contributed to the preservation of Indonesia's greatest cultural heritage.